

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional serta penggerak ekonomi kerakyatan di Indonesia. Menurut data Badan Pusat Statistik (2020), sektor UMKM merupakan salah satu kelompok usaha sebagai penyangga utama dan berdampak pada penyerapan tenaga kerja secara keseluruhan dengan kontribusi sebanyak 97%. UMKM juga memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional sebesar 61,97% atau setara Rp 8.500 triliun pada tahun 2020 serta sebagai salah satu sumber penting pertumbuhan ekspor khususnya ekspor non-migas. Menurut UU No. 20 Tahun 2008, pengertian UMKM dibagi atas beberapa definisi. Pertama, usaha mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro. Kedua, usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang bukan merupakan anak perusahaan yang dimiliki oleh usaha menengah maupun usaha besar dan memenuhi kriteria usaha kecil. Ketiga, usaha menengah merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang bukan merupakan anak perusahaan dari usaha kecil maupun besar dan memenuhi kriteria usaha menengah (Ayem dan Wahidah, 2021).

Bagian terpenting dalam operasional UMKM salah satunya adalah manajemen keuangan yang dapat membantu usaha untuk mengelola kas dan arus kas dengan efektif, menjaga likuiditas dan menghindari masalah keuangan,

mengelola utang dan modal dengan efektif, pengelolaan risiko, serta pengambilan keputusan keuangan demi mencapai kinerja keuangan yang optimal. Kinerja keuangan UMKM adalah pengukuran tentang kemampuan UMKM dalam menghasilkan keuntungan dan mengelola keuangan secara efektif. Kinerja keuangan mencakup berbagai aspek seperti pertumbuhan penjualan, margin keuntungan, efisiensi pengelolaan biaya, manajemen kas, pengelolaan utang dan modal, dan lain-lain (Suyanto, 2022). UMKM dengan kinerja keuangan yang baik biasanya memiliki pertumbuhan yang stabil, peningkatan laba, likuiditas yang baik, dan struktur modal yang seimbang. Sebaliknya, UMKM dengan kinerja keuangan yang buruk cenderung mengalami kesulitan dalam menghasilkan keuntungan yang cukup, memiliki utang yang tinggi, dan mungkin menghadapi risiko kebangkrutan atau likuidasi bisnis (Ye dan Kulathunga, 2019). Pengukuran kinerja keuangan UMKM dapat membantu pemilik bisnis untuk mengevaluasi keberhasilan usahanya dan menentukan langkah-langkah yang perlu diambil untuk memperbaiki kinerja keuangannya. Hal ini dapat membantu meningkatkan keberlangsungan bisnis dan memperoleh sumber pembiayaan untuk mengembangkan bisnis di masa depan (Pangestu, 2021).

Provinsi Bali merupakan salah satu wilayah di Indonesia dengan pertumbuhan UMKM yang cukup tinggi yaitu tercatat sebanyak 440.609 UMKM pada tahun 2022 yang tersebar di 9 kabupaten dan kota (Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Bali, 2022). Kabupaten Gianyar berada pada peringkat keempat di Provinsi Bali ditinjau dari pertumbuhan jumlah UMKM dari tahun ke tahun. Kabupaten Gianyar memiliki luas wilayah sebesar 368 km² dengan populasi sekitar 527.750 jiwa pada tahun 2020. Kabupaten Gianyar terdiri dari 7 kecamatan yaitu

Blahbatuh, Gianyar, Payangan, Sukawati, Tampaksiring, Tegallalang, dan Ubud. Sebagian besar kegiatan ekonomi di Kabupaten Gianyar adalah sektor perdagangan, pertanian, dan pariwisata. Pelaku ekonomi di Kabupaten Gianyar didominasi oleh pengusaha yang tergolong dalam kelompok Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang mana komoditas perdagangan menjadi kegiatan ekonomi utama sebagian besar masyarakat (Desmayani, 2022). Data jumlah UMKM di Kabupaten Gianyar berdasarkan jenis usaha tahun 2019-2021 ditunjukkan pada Tabel 1. 1 berikut ini.

Tabel 1. 1
Data Jumlah UMKM di Kabupaten Gianyar Berdasarkan Jenis Usaha
Tahun 2019-2021

Tahun	Jenis Usaha				Jumlah
	Pertanian	Non Pertanian	Perdagangan	Jasa	
2019	9.879	27.484	30.253	7.696	73.312
2020	9.894	27.499	30.255	7.764	75.412
2021	9.894	27.507	30.377	7.764	75.542

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Bali (2022)

Berdasarkan Tabel 1. 1, diketahui bahwa jumlah UMKM di Kabupaten Gianyar selama tahun 2019 hingga 2021 mengalami peningkatan. Ditinjau dari jenis usaha, sektor UMKM yang mendominasi adalah sektor perdagangan dan disusul oleh sektor non pertanian. Banyaknya UMKM yang terdapat di Kabupaten Gianyar mengindikasikan tingginya persaingan yang terjadi antar UMKM, sehingga setiap usaha dituntut untuk memiliki strategi serta pengelolaan usaha yang tepat termasuk pengelolaan operasional, keuangan, pemasaran, teknologi, dan lain-lain agar kinerja usaha dapat ditingkatkan karena kontribusi sektor UMKM

terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gianyar sangat besar dan sebagai salah satu sektor unggulan. Walaupun peran strategis serta tingkat pertumbuhan cukup kuat, namun terdapat sejumlah permasalahan yang dihadapi UMKM di Kabupaten Gianyar menurut penelitian Desmayani (2022) yaitu adanya penurunan kegiatan usaha selama tahun 2019 hingga 2021 meliputi penjualan (52%), kesulitan pengelolaan keuangan (16%) kesulitan modal (12%), kesulitan distribusi (10%), kesulitan bahan baku (6%), serta kesulitan pemberdayaan karyawan (4%). Berdasarkan permasalahan tersebut, kinerja keseluruhan dari UMKM di Kabupaten Gianyar perlu dioptimalkan melalui efektivitas faktor-faktor yang mampu berdampak pada peningkatan kinerja keuangan.

Kinerja keuangan bagi UMKM merupakan aspek penting yang harus diperhatikan oleh pemilik atau pengelola untuk mengukur keberhasilan dan keberlanjutan usahanya. Pemantauan yang baik terhadap kinerja keuangan akan membantu suatu usaha dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang perlu ditingkatkan serta mengambil keputusan yang tepat untuk mencapai pertumbuhan jangka panjang (Pangestu, 2021). Kinerja keuangan adalah evaluasi maupun analisis pada kondisi keuangan dengan melibatkan pengukuran dan penilaian berbagai aspek yang mencerminkan kesehatan, keberhasilan, serta keberlanjutan keuangan suatu usaha atau entitas bisnis (Desmayani, 2022). Kinerja keuangan dapat mencakup tingkat pendapatan atau penjualan, laba bruto atau pendapatan dikurangi biaya langsung, laba bersih atau pendapatan dikurangi semua biaya termasuk dan beban lainnya, arus kas atau jumlah uang yang masuk dan keluar dari entitas bisnis, serta ekspansi dan pertumbuhan aset. Sistem pengukuran kinerja yang baik adalah sekumpulan ukuran kinerja usaha yang menyediakan informasi

yang berguna sehingga dapat membantu mengelola, mengontrol, merencanakan, serta melaksanakan aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh suatu usaha (Ye dan Kulathunga, 2019). Adapun faktor-faktor internal yang mempengaruhi kinerja keuangan khususnya pada UMKM ditunjukkan dari kemampuannya dalam mengelola modal, inklusi keuangan sebagai akses terhadap produk dan layanan keuangan, serta literasi atau pengetahuan dalam pengelolaan keuangan usaha.

Modal dianggap sebagai investasi dari usaha yang merupakan pengeluaran untuk membeli peralatan produksi dan barang modal yang bertujuan menambah dana dalam kegiatan ekonomi khususnya memproduksi barang dan jasa. Setiap entitas bisnis dapat berdiri dan melakukan kegiatan operasionalnya karena didukung oleh modal yang digunakan sebagai pokok untuk berdagang, melepas uang, dan sebagainya dalam menghasilkan sesuatu yang menambah keuntungan usaha (Sukirno, 2016:76). Menurut Permadi (2019), sebagian besar UMKM memiliki manajemen keuangan yang masih sangat tradisional, sehingga pengelola cenderung sulit untuk membedakan uang operasional usaha dan uang pribadi atau rumah tangga. Hal ini menyebabkan kendala pada kemampuan usaha dalam menggunakan atau mengelola modal dengan efektif dan efisien. Beberapa UMKM tidak menggunakan modal dengan bijak sehingga menggunakan kas usaha untuk hal-hal yang tidak diperlukan atau tidak mendukung pertumbuhan bisnis, selain itu juga tidak mampu mengelola arus kas secara efektif sehingga mengalami kesulitan dalam mengatur pembayaran kepada pemasok atau tagihan bulanan. Kurangnya pemahaman tentang modal dapat menyebabkan ketidakstabilan keuangan dan masalah likuiditas (Alamsyah, 2020).

Pengelolaan modal usaha yang baik ditunjukkan melalui perencanaan keuangan, pengendalian pada pengeluaran dan biaya, efektivitas manajemen arus kas, serta pemantauan dan analisis keuangan. Optimalisasi penggunaan modal dapat membantu suatu bisnis untuk mencapai tujuan keuangan jangka pendek dan jangka panjang serta meningkatkan kinerja secara keseluruhan (Nakibuuka dkk., 2020). Penelitian yang dilakukan Ayem dan Wahidah (2021), Ferdiansyah dan Bukhari (2021), serta Taufik, dkk., (2022) membuktikan bahwa modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Indikasi dari sejumlah hasil penelitian tersebut yaitu adanya akses dan pengelolaan modal yang lebih baik dapat memfasilitasi kegiatan operasional secara keseluruhan, sehingga pada gilirannya mampu meningkatkan kinerja usaha. Modal yang efektif dapat memastikan ketersediaan dana yang cukup untuk membiayai kegiatan operasional, pengembangan produk, investasi aset, serta berbagai kebutuhan bisnis lainnya, sehingga modal mampu meningkatkan pertumbuhan dan kinerja pada aspek keuangan usaha. Hasil berbeda ditemukan oleh Rofiq dan Edward (2019) serta Wijaya, dkk., (2021) yaitu modal tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan serta mengindikasikan bahwa meskipun modal yang cukup dapat memberikan kestabilan keuangan, namun keseimbangan struktur modal atau efektivitas pengelolaan modal belum tentu mendukung tingkat kinerja keuangan suatu usaha.

Inklusi keuangan merupakan ketersediaan akses layanan keuangan ke berbagai lembaga, produk maupun layanan keuangan yang dapat dijangkau dengan mudah, nyaman dan aman oleh seluruh lapisan masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan guna untuk mencapai kesejahteraan (Kusuma, 2019). Inklusi

keuangan merupakan alat untuk memperkuat pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan memudahkan akses ke produk dan instrumen keuangan, melindungi dari kerugian finansial, serta meningkatkan peluang ekonomi yang lebih besar. Menurut Siswanti (2020), sebagian besar UMKM masih menghadapi kendala dalam akses layanan keuangan dan pendanaan, yang mana sebanyak 60% hingga 70% UMKM di Indonesia belum mendapatkan pembiayaan perbankan. Permasalahan utama dari inklusi keuangan pada UMKM adalah terbatasnya akses ke lembaga keuangan formal seperti bank karena banyak usaha tidak memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk mendapatkan pinjaman bank seperti tidak adanya catatan keuangan yang teratur dan akurat, jaminan yang cukup, maupun riwayat kredit yang baik. Lokasi geografis yang terpencil atau jauh dari lembaga keuangan juga dapat menjadi kendala UMKM dalam mengakses layanan keuangan (Kusuma, 2019).

Akses yang lebih baik ke sumber daya keuangan melalui inklusi keuangan dapat membantu suatu usaha untuk mengumpulkan dana yang diperlukan dalam memulai atau mengembangkan bisnis. Inklusi keuangan yang memadai tersebut memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan kinerja keuangannya (Yanti, 2019). Penelitian yang dilakukan Septiani dan Wuryani (2020), Febriana dan Sulhan (2021), serta Budiasni, dkk., (2022) membuktikan bahwa inklusi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Indikasi dari sejumlah hasil penelitian tersebut yaitu inklusi keuangan dengan akses pada layanan perbankan dapat membantu usaha untuk menciptakan kestabilan keuangan, yang pada akhirnya berdampak positif pada kinerja keuangan. Inklusi keuangan dapat membantu usaha untuk memperluas pasar serta mencapai efisiensi

operasional, sehingga mampu meningkatkan kinerja keuangan. Hasil berbeda ditemukan oleh Puspitasari dan Astrini (2021) serta Suyanto (2022) yaitu inklusi keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Indikasi dari hasil tersebut yakni inklusi keuangan sendiri tidak dapat secara langsung mengatasi masalah ekonomi atau lingkungan bisnis yang lebih luas dan kompleks. Layanan keuangan yang tersedia mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik suatu usaha, sehingga inklusi keuangan tidak berdampak pada kinerja keuangan.

Literasi keuangan adalah pemahaman istilah keuangan, kemampuan, dan keterampilan untuk menerapkan pengetahuan seperti pengelolaan uang, inflasi, suku bunga, kredit, dan investasi ke dalam kehidupan pribadi dengan memiliki kesadaran penuh akan konsekuensi dari setiap tindakan keuangan yang dilakukan (Amri dan Iramani, 2018). Menurut Survei Literasi dan Inklusi Keuangan (SLIK) yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2022, tingkat literasi keuangan di Indonesia adalah sebesar 49,68%. Hal ini mengartikan bahwa hanya sekitar 49,68% dari penduduk Indonesia yang memiliki pengetahuan yang cukup tentang manajemen keuangan. Sesuai dengan konteks literasi keuangan dalam pengelolaan usaha, pemahaman ini terkait aspek keuangan dalam bisnis seperti laporan keuangan, analisis rasio, manajemen modal kerja, investasi bisnis, serta pengambilan keputusan keuangan (Siswanti, 2020). Literasi keuangan yang baik memungkinkan pengusaha atau pengelola bisnis untuk mengelola keuangan perusahaan dengan efisien dan mengambil keputusan yang tepat. Penting bagi pemilik atau pengelola UMKM untuk memiliki literasi keuangan yang memadai

terkait pemahaman mengenai pembuatan anggaran, pengelolaan arus kas, dan pengendalian pengeluaran (Budiasni dkk., 2022).

Pemilik atau pengelola UMKM dengan literasi keuangan yang baik dapat mengelola sumber daya keuangan dengan lebih bijaksana. Literasi keuangan dibutuhkan dalam manajemen usaha khususnya dalam membuat keputusan berdasarkan informasi keuangan yang akurat, sehingga hal ini juga dapat menentukan kinerja keuangan usaha (Ye dan Kulathunga, 2019). Penelitian yang dilakukan Alamsyah (2020), Septiani dan Wuryani (2020), serta Febriana dan Sulhan (2021) membuktikan bahwa literasi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Indikasi dari sejumlah hasil penelitian tersebut yaitu pengusaha dengan literasi keuangan yang memadai cenderung mampu membuat keputusan keuangan yang lebih bijaksana, sehingga hal ini akan mengarahkan usaha pada tingkat kinerja yang lebih tinggi. Semakin tinggi tingkat literasi keuangan yang dimiliki pengelola usaha, maka semakin tinggi pula pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja keuangan usahanya. Hasil berbeda ditemukan oleh Kumalasari dan Asandimitra (2019) serta Puspitasari dan Astrini (2021) yaitu literasi keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Indikasi dari hasil tersebut yakni literasi keuangan penting dalam pengelolaan keuangan namun faktor-faktor eksternal lainnya juga berperan dalam menentukan operasional usaha, sehingga literasi keuangan belum tentu mampu meningkatkan kinerja keuangan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang, rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh modal terhadap kinerja keuangan pada UMKM di Kabupaten Gianyar?
2. Bagaimana pengaruh inklusi keuangan terhadap kinerja keuangan pada UMKM di Kabupaten Gianyar?
3. Bagaimana pengaruh literasi keuangan terhadap kinerja keuangan pada UMKM di Kabupaten Gianyar?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh modal terhadap kinerja keuangan pada UMKM di Kabupaten Gianyar.
2. Untuk mengetahui pengaruh inklusi keuangan terhadap kinerja keuangan pada UMKM di Kabupaten Gianyar.
3. Untuk mengetahui pengaruh literasi keuangan terhadap kinerja keuangan pada UMKM di Kabupaten Gianyar.

UNMAS DENPASAR

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini dan tujuan yang ingin diperoleh, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis sebagai berikut.

1.4.1 Manfaat teoritis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai media untuk mengaplikasikan ilmu dan teori yang telah diperoleh agar dapat memberikan bukti empiris pada ilmu

manajemen khususnya pada bidang manajemen keuangan, ekonomi kerakyatan, kewirausahaan, modal, inklusi keuangan, literasi keuangan, serta kinerja keuangan pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

1.4.2 Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi para pelaku UMKM di Kabupaten Gianyar untuk mengetahui faktor apa saja yang berpengaruh terhadap kinerja keuangan usahanya, sehingga dapat mengambil keputusan serta membuat kebijakan yang tepat dalam penerapan manajemen keuangan dan peningkatan kinerja keuangan melalui faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu modal, inklusi keuangan, dan literasi keuangan.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1. Teori kesejahteraan ekonomi

Teori kesejahteraan ekonomi adalah suatu kerangka konseptual yang mempelajari dan menganalisis hubungan antara faktor-faktor ekonomi dengan kesejahteraan individu atau masyarakat. Teori ini berfokus pada bagaimana sumber daya ekonomi digunakan, dialokasikan, dan diperoleh untuk mencapai kesejahteraan yang maksimal. Pada teori kesejahteraan ekonomi, kesejahteraan diukur bukan hanya dari sudut pandang kekayaan materi atau pendapatan saja, namun juga melibatkan aspek-aspek lain seperti keadilan distributif, kebebasan individu, dan kualitas hidup secara menyeluruh (Kustanto, 2022). Tujuan utama dari teori kesejahteraan ekonomi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Teori kesejahteraan ekonomi melibatkan konsep-konsep seperti utilitas, keadilan, efisiensi, dan alokasi sumber daya. Teori ini juga mempertimbangkan adanya *trade-off* dan pilihan yang harus dibuat dalam mengalokasikan sumber daya, serta dampak dari kebijakan ekonomi dan struktur pasar terhadap kesejahteraan individu dan masyarakat. Teori kesejahteraan ekonomi mengemukakan bahwa akses yang lebih baik terhadap layanan keuangan dan pemahaman yang baik tentang konsep keuangan akan meningkatkan kesejahteraan ekonomi individu dan entitas (Styaningrum, 2021).

Pada konteks pengaruh modal, inklusi keuangan, dan literasi keuangan terhadap kinerja keuangan UMKM, teori kesejahteraan ekonomi membantu

memahami bagaimana faktor-faktor tersebut dapat berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi UMKM melalui peningkatan kinerja keuangan. Modal yang memadai dapat berkontribusi secara positif terhadap kinerja keuangan UMKM karena memungkinkan UMKM untuk melakukan investasi dalam peralatan, inventaris, SDM, dan infrastruktur yang diperlukan untuk meningkatkan produksi dan efisiensi. Apabila UMKM memiliki modal yang memadai, maka pengelola dapat mengembangkan bisnisnya dengan lebih baik, meningkatkan penjualan, dan mengoptimalkan keuntungan (Nasution, dkk., 2022). Inklusi keuangan berperan penting dalam teori kesejahteraan ekonomi karena melalui inklusi keuangan yang baik, UMKM dapat mengakses berbagai layanan keuangan seperti perbankan, pinjaman, asuransi, dan instrumen keuangan lainnya. Akses yang lebih luas terhadap layanan keuangan dapat membantu UMKM memperoleh modal tambahan, mengelola risiko, meningkatkan likuiditas, dan memanfaatkan peluang pertumbuhan (Styaningrum, 2021).

Literasi keuangan menjadi faktor penting dalam meningkatkan kinerja keuangan UMKM sebagai salah satu implikasi pada teori kesejahteraan ekonomi karena tingkat literasi keuangan yang tinggi memungkinkan UMKM untuk membuat keputusan keuangan yang lebih baik dan memahami implikasi dari tindakan mereka terhadap kinerja keuangan. Pemahaman yang baik tentang konsep keuangan dapat membuat UMKM dapat mengelola keuangan dengan efektif, membuat strategi investasi yang cerdas, dan mengurangi risiko keuangan yang tidak perlu (Kustanto, 2022). Secara keseluruhan, teori kesejahteraan ekonomi mendukung pemahaman bahwa modal, inklusi keuangan, dan literasi keuangan berkontribusi terhadap peningkatan kinerja keuangan UMKM. Adanya modal yang

memadai, akses yang baik terhadap layanan keuangan, dan tingkat literasi keuangan yang tinggi dapat membuat UMKM mencapai tingkat kesejahteraan ekonomi yang lebih baik melalui peningkatan kinerja keuangan usahanya.

2.1.2. Kinerja keuangan

Kinerja keuangan merupakan gambaran kondisi keuangan usaha atau bisnis pada suatu periode tertentu baik menyangkut aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dana, yang biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas, harga saham. Kinerja suatu usaha dapat diketahui melalui laporan keuangan yang menunjukkan keadaan finansial dan hasil-hasil yang telah dicapai dari kegiatan usaha atau bisnis selama periode tertentu (Suhardi, 2016:27). Pihak yang memiliki kepentingan terhadap perkembangan suatu usaha sangat perlu untuk mengetahui kondisi keuangan tersebut untuk mengambil keputusan strategis. Pengukuran kinerja keuangan digunakan perusahaan untuk melakukan perbaikan atas kegiatan operasionalnya agar dapat bersaing dengan perusahaan lain.. Selain itu, pengukuran kinerja dilakukan untuk memperlihatkan kepada penanam modal maupun pelanggan atau masyarakat secara umum bahwa perusahaan memiliki kredibilitas yang baik (Ayem dan Wahidah, 2021).

Kinerja keuangan adalah pengukuran kinerja suatu badan atau organisasi bisnis dalam hal pengelolaan keuangan dan aset yang dimilikinya. Kinerja keuangan dapat diukur dengan menggunakan berbagai pendekatan seperti rasio keuangan, laporan keuangan, dan analisis tren. Tujuan dari pengukuran kinerja keuangan adalah untuk mengevaluasi kesehatan keuangan usaha serta mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat memengaruhi keberhasilannya (Suyanto, 2022). Kinerja keuangan pada UMKM sangat penting untuk diukur karena dapat

membantu pemilik usaha untuk memantau kesehatan keuangan usahanya, mengidentifikasi area di mana peningkatan dapat dilakukan, dan memperkirakan kemampuan usaha untuk bertahan dalam jangka panjang. Pada konteks UMKM, pengukuran kinerja keuangan juga dapat membantu pemilik usaha dalam mengambil keputusan keuangan yang tepat, termasuk keputusan tentang investasi, pembiayaan, dan ekspansi usaha (Permadi, 2019). Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan suatu usaha menurut Suhardi (2016:34), antara lain sebagai berikut:

1. Pendapatan atau penjualan, merupakan faktor utama yang mempengaruhi kinerja keuangan suatu usaha. Semakin tinggi pendapatan usaha, maka semakin besar potensi keuntungan yang dapat diperoleh.
2. Biaya produksi, termasuk biaya bahan baku, tenaga kerja, *overhead*, dan biaya operasional lainnya memiliki dampak langsung terhadap kinerja keuangan. Upaya mengendalikan biaya produksi dan meningkatkan efisiensi operasional dapat meningkatkan profitabilitas.
3. Struktur modal, mengacu pada komposisi sumber pendanaan usaha, seperti modal sendiri dan utang. Struktur modal yang tepat dapat mempengaruhi tingkat risiko, biaya modal, dan potensi keuntungan.
4. Manajemen kas, yang mana pengelolaan kas penting untuk menjaga likuiditas dan stabilitas keuangan usaha. Pengelolaan yang efektif meliputi perencanaan anggaran, pengendalian pengeluaran, manajemen piutang dan utang, serta investasi kas yang tepat.
5. Kondisi ekonomi secara umum, seperti pertumbuhan GDP, inflasi, suku bunga, dan kestabilan mata uang, dapat mempengaruhi kinerja keuangan usaha.

Ekonomi yang kuat biasanya menciptakan peluang pertumbuhan, sedangkan ekonomi yang lemah dapat menghadirkan tantangan.

6. Peraturan dan kebijakan pemerintah, termasuk pajak, regulasi industri, dan kebijakan fiskal, dapat berdampak signifikan pada kinerja keuangan usaha. Perubahan kebijakan dapat mempengaruhi biaya, pendapatan, dan keuntungan usaha.
7. Manajemen keuangan, yakni keputusan manajemen keuangan yang cerdas, seperti alokasi modal yang tepat, pengelolaan risiko yang efektif, dan perencanaan keuangan yang baik, dapat berkontribusi pada kinerja keuangan yang kuat.

Menurut Pangestu (2021), indikator untuk mengukur kinerja keuangan pada UMKM adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan, yaitu sumber utama penghasilan UMKM dan dapat digunakan untuk menentukan seberapa berhasilnya usaha tersebut menghasilkan uang dari operasional bisnisnya. Pengukurannya adalah pertumbuhan pendapatan, rasio laba kotor, dan margin laba kotor.
2. Profitabilitas, yaitu mengukur kemampuan UMKM untuk menghasilkan laba dari operasi bisnisnya. Pengukurannya adalah rasio laba bersih terhadap penjualan.
3. Likuiditas, yaitu mengukur kemampuan UMKM untuk memenuhi kewajiban finansialnya dalam jangka pendek.
4. Efisiensi, yaitu mengukur seberapa baik UMKM menggunakan sumber daya finansialnya untuk menghasilkan pendapatan dan laba.

5. Pertumbuhan, yaitu mengukur kemampuan UMKM untuk meningkatkan pendapatan dan laba dari waktu ke waktu. Pengukurannya adalah pertumbuhan penjualan dan pertumbuhan laba.

2.1.3. Modal

Modal adalah kekayaan perusahaan yang dapat digunakan untuk kegiatan produksi, yang mana modal merupakan faktor produksi yang mempunyai pengaruh kuat dalam mendapatkan produktivitas atau *output*. Secara makro, modal merupakan pendorong besar untuk meningkatkan investasi baik secara langsung pada proses produksi maupun dalam prasarana produksi, sehingga mampu mendorong kenaikan produktivitas (Umar, 2017:17). Modal adalah sebagai kolektivitas dari barang-barang modal yang terdapat dalam neraca sebelah debit, yang dimaksud dengan barang-barang modal adalah semua barang yang ada dalam rumah tangga perusahaan dalam fungsi produktivitasnya untuk membentuk pendapatan (Riyanto, 2015:18). Modal usaha atau yang sering disebut investasi merupakan pengeluaran untuk membeli peralatan produksi dan barang modal yang bertujuan untuk menambah modal dalam kegiatan perekonomian untuk memproduksi barang dan jasa. Modal adalah uang yang dipakai sebagai pokok usaha seperti induk untuk berdagang, melepas uang, harta benda, dan sebagainya yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu yang menambah kekayaan (Sukirno, 2016:76).

Ketersediaan modal sangat diperlukan dalam suatu usaha atau bisnis, sehingga pengelolaan modal secara optimal sangat penting dilakukan agar usaha yang dijalankan dapat berjalan lancar. Modal dapat diartikan sebagai sesuatu yang diperlukan untuk membiayai kegiatan perusahaan mulai dari berdiri hingga

beroperasi. Modal dalam bentuk uang diperlukan untuk membiayai segala keperluan usaha, mulai dari biaya pra-investasi, pengurusan izin, biaya investasi untuk pembelian aktiva tetap, serta modal kerja (Taufik dkk., 2022). Modal usaha adalah aset baik berupa barang-barang atau dana yang dijadikan sebagai pokok menjalankan bisnis. Hal ini berarti jika suatu dapat mampu mengatur dana modal dengan baik, maka akan mampu membangun usaha dengan optimal karena modal pada dasarnya merupakan pondasi dalam menjalankan usaha (Septiani dan Wuryani, 2020). Modal dapat digolongkan menjadi beberapa jenis baik berdasarkan sumber, bentuk, kepemilikan, maupun sifat menurut Alma (2018:24), yaitu sebagai berikut:

1. Berdasarkan sumber, modal dapat dibagi menjadi modal sendiri dan modal asing. Modal sendiri misalnya setoran dari pihak pemilik perusahaan, sedangkan modal asing berupa pinjaman dari lembaga keuangan maupun non-keuangan.
2. Berdasarkan bentuk, modal dapat terbagi menjadi modal konkret dan modal abstrak. Modal konkret meliputi mesin, gedung, kendaraan dan peralatan, sedangkan modal abstrak meliputi hak merk dan nama baik perusahaan.
3. Berdasarkan kepemilikan, modal dapat dibagi menjadi modal individu dan modal masyarakat. Modal individu misalnya rumah pribadi yang disewakan, sedangkan modal masyarakat misalnya rumah sakit umum milik perusahaan, jalan, dan jembatan.
4. Berdasarkan sifat, modal dapat terbagi menjadi modal tetap dan modal lancar. Modal tetap seperti bangunan dan mesin, sedangkan modal lancar seperti bahan-bahan baku.

Menurut Sukirno (2016:86), modal dapat diinterpretasikan sebagai sejumlah uang yang digunakan dalam menjalankan kegiatan-kegiatan bisnis, yang mana secara keseluruhan modal usaha terbagi menjadi tiga bagian yaitu:

1. Modal investasi, merupakan jenis modal usaha yang harus dikeluarkan dan dipakai dalam jangka panjang. Modal usaha untuk investasi nilainya cukup besar karena dipakai untuk jangka waktu lama atau panjang, namun modal investasi akan menyusut dari tahun ke tahun bahkan bisa bulan ke bulan.
2. Modal kerja, merupakan modal usaha yang diharuskan untuk membuat atau membeli barang dagangan. Modal kerja ini dapat dikeluarkan setiap bulan atau pada waktu-waktu tertentu.
3. Modal operasional, merupakan modal usaha yang harus dikeluarkan untuk membayar biaya operasi bulanan misalnya pembayaran gaji karyawan, listrik, dan sebagainya.

Adapun indikator modal usaha mengacu pada Alma (2018:27), yaitu sebagai berikut:

1. Struktur permodalan, terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri merupakan modal yang berasal dari pemilik perusahaan dan yang tertanam di dalam perusahaan untuk waktu yang tidak tertentu lamanya. Oleh karena itu, modal sendiri ditinjau dari sudut likuiditas merupakan dana jangka panjang yang tidak tertentu likuiditasnya. Sedangkan modal pinjaman atau modal asing adalah modal yang berasal dari luar perusahaan yang sifatnya sementara bekerja di dalam perusahaan, dan bagi perusahaan yang bersangkutan modal tersebut merupakan utang yang pada saatnya harus dibayar kembali.

2. Pemanfaatan modal tambahan, yaitu pengaturan pinjaman modal dari bank atau lembaga keuangan lainnya harus dilakukan dengan baik. Penggunaan modal tambahan sebagaimana tujuan awal adalah efektif apabila dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha. Kebanyakan pebisnis gagal dalam mengelola pinjaman, karena memberikan porsi yang lebih banyak pada belanja konsumtif daripada produktif.
3. Akses pada modal eksternal, yaitu kemampuan usaha untuk mendapatkan sumber modal dari pihak eksternal di luar bisnisnya. Modal eksternal dapat berupa pinjaman, investasi, atau pendanaan yang diberikan oleh lembaga keuangan, investor, atau pihak lain yang tertarik untuk mendukung pertumbuhan usaha.
4. Keadaan usaha setelah menambahkan modal, yaitu tentunya yang diharapkan setelah menambahkan modal adalah usaha yang dijalankan akan lebih berkembang. Penggunaan modal dengan efektif dapat tercermin dari pengembangan usaha setelahnya.

2.1.4. Inklusi keuangan

Inklusi keuangan merupakan kondisi pada saat seluruh masyarakat memiliki akses produk dan layanan jasa keuangan. Inklusi keuangan dapat didefinisikan sebagai proses memastikan akses layanan keuangan dan kredit yang dapat diakses oleh setiap golongan dengan biaya yang terjangkau (Siswanti, 2020). Inklusi keuangan merupakan kemampuan individu atau kelompok yang dapat memiliki akses terhadap produk dan layanan keuangan. Layanan yang dimaksud tersebut bersifat formal yang bermanfaat dan terjangkau serta mampu memenuhi kebutuhan, seperti transaksi, pembayaran, tabungan, kredit dan asuransi secara bertanggung

jawab dan berkelanjutan (Febriana dan Sulhan, 2021). Inklusi keuangan merupakan ketersediaan akses layanan keuangan ke berbagai lembaga, produk maupun layanan keuangan yang dapat dijangkau dengan mudah, nyaman dan aman oleh seluruh lapisan masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat guna untuk mencapai kesejahteraan (Kusuma, 2019).

Manfaat inklusi keuangan yaitu meningkatnya akses masyarakat terhadap lembaga, produk dan layanan jasa keuangan pelaku usaha jasa keuangan, meningkatnya penyediaan produk dan/atau layanan jasa keuangan oleh pelaku usaha jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat, meningkatnya penggunaan produk dan/atau layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat, serta meningkatnya kualitas penggunaan produk dan layanan jasa keuangan sesuai kebutuhan dan kemampuan masyarakat (Puspitasari dan Astrini, 2021). Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif, keuangan inklusif merupakan komponen penting dalam proses inklusi sosial dan ekonomi yang berperan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan stabilitas sistem keuangan, mendukung program penanggulangan kemiskinan, serta mengurangi kesenjangan antar individu dan antar daerah dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat (Febriana dan Sulhan, 2021). Tujuan inklusi keuangan menurut Hidajat (2017:55) adalah sebagai berikut:

1. Mengurangi ketimpangan keuangan, yaitu inklusi keuangan bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antara individu dan kelompok yang memiliki akses terhadap layanan keuangan dengan yang tidak memiliki akses. Akses yang

merata melalui inklusi keuangan dapat membantu mengurangi ketimpangan keuangan dan meningkatkan kesetaraan ekonomi.

2. Mendorong pertumbuhan ekonomi, yaitu inklusi keuangan memiliki potensi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Pemberian akses ke layanan keuangan membantu UMKM untuk memperoleh pembiayaan yang diperlukan untuk mengembangkan bisnis, menciptakan lapangan kerja, dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang lebih luas.
3. Mengurangi kemiskinan, yaitu akses terhadap layanan keuangan yang inklusif dapat membantu mengurangi kemiskinan. Tabungan, pinjaman, dan asuransi yang terjangkau melalui inklusi keuangan dapat membantu dalam mengelola risiko keuangan serta memanfaatkan peluang ekonomi yang dapat membantu masyarakat keluar dari kemiskinan.
4. Meningkatkan ketahanan keuangan, yaitu inklusi keuangan dapat membantu meningkatkan ketahanan keuangan individu maupun usaha. Akses ke layanan keuangan yang mencakup asuransi dan instrumen investasi dapat melindungi masyarakat dari kejadian tak terduga dan mempersiapkan masa depan dengan lebih baik.
5. Meningkatkan resiliensi ekonomi, yaitu inklusi keuangan dapat membantu meningkatkan resiliensi ekonomi pada tingkat nasional. Adanya sistem keuangan yang inklusif dapat membuat negara lebih tahan terhadap krisis keuangan dan memperkuat stabilitas ekonomi secara keseluruhan.
6. Mendorong inovasi keuangan, inklusi keuangan juga mendorong inovasi dalam sektor keuangan serta meningkatkan pengembangan produk dan layanan keuangan yang lebih efisien, terjangkau, dan sesuai dengan kebutuhan pasar.

Menurut Hidajat (2017:59), inklusi keuangan bagi usaha merujuk pada akses dan partisipasi yang merata dari berbagai jenis usaha yang sangat penting penting karena inklusi keuangan dapat memberikan sejumlah manfaat bagi usaha. Indikator inklusi keuangan antara lain sebagai berikut:

1. Akses ke lembaga keuangan, mengukur jumlah orang atau usaha kecil yang memiliki akses ke lembaga keuangan formal seperti bank, koperasi, atau lembaga keuangan mikro.
2. Penggunaan produk keuangan, mengukur seberapa banyak orang atau usaha kecil yang menggunakan produk keuangan seperti tabungan, kredit, kartu kredit, atau asuransi.
3. Jangkauan geografis, mengukur sejauh mana lembaga keuangan dan produk keuangan dapat diakses oleh masyarakat di berbagai wilayah, termasuk wilayah yang terpencil atau terpinggirkan.
4. Ketersediaan infrastruktur keuangan, mengukur seberapa baik infrastruktur keuangan yang tersedia, seperti jaringan ATM atau kantor cabang bank, untuk mendukung akses dan penggunaan produk keuangan.
5. Inovasi produk keuangan, mengukur seberapa banyak inovasi produk keuangan yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang beragam, seperti produk keuangan berbasis teknologi atau produk keuangan yang ditujukan untuk usaha kecil.
6. Pengetahuan keuangan, mengukur seberapa baik pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang konsep keuangan dan produk keuangan yang tersedia, serta kemampuan mereka untuk mengambil keputusan keuangan yang tepat.

2.1.5. Literasi keuangan

Literasi keuangan merupakan pengetahuan pengelolaan keuangan serta pengetahuan mengenai prinsip, konsep dasar, dan metode untuk menggunakan uang secara bijaksana. Literasi keuangan didefinisikan sebagai kemampuan untuk mengetahui dan memahami topik yang berhubungan dengan keuangan, termasuk pengetahuan mengenai cara-cara yang dapat digunakan untuk meningkatkan pengembalian keuangan (Ye dan Kulathunga (2019)). Literasi keuangan juga diartikan sebagai pemahaman istilah keuangan, kemampuan, dan keterampilan untuk menerapkan pengetahuan seperti pengelolaan uang, inflasi, suku bunga, kredit, dan investasi ke dalam kehidupan pribadi dengan memiliki kesadaran penuh akan konsekuensi dari setiap tindakan keuangan yang dilakukan (Amri dan Iramani, 2018). Literasi keuangan adalah kemampuan individu untuk memahami, menganalisis, dan mengelola keuangan pribadi atau bisnis secara efektif. Literasi keuangan mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam mengambil keputusan keuangan yang tepat, termasuk dalam hal mengelola uang, mengambil kredit, berinvestasi, serta merencanakan dan mempersiapkan keuangan di masa depan. Individu yang memiliki literasi keuangan yang baik akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang konsep dasar keuangan, seperti pengelolaan anggaran, manajemen risiko, investasi, dan perencanaan keuangan masa depan (Kusuma, 2019).

Pemahaman mengenai keuangan sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari karena dengan memiliki tingkat literasi keuangan yang tinggi dapat memberikan solusi untuk memecahkan masalah yang muncul dalam pengelolaan keuangan. Literasi keuangan penting dalam membentuk sikap dan perilaku individu

terkait segala sesuatu yang berhubungan dengan uang. Kurangnya literasi keuangan dapat menyebabkan kerugian bagi individu akibat salah mengambil keputusan terkait pengelolaan uang, kredit, serta keputusan menabung dan investasi yang mengarah pada akibat-akibat lain seperti penurunan kondisi ekonomi (Rofiq dan Edward, 2019). Indikasi munculnya literasi keuangan dimulai dengan suatu kesadaran dan pemahaman mengenai jenis dan produk keuangan, lembaga keuangan, dan perilaku keuangan yang umum seperti pengelolaan uang dan perencanaan keuangan pribadi (Septiani dan Wuryani, 2020). Menurut Hidajat (2017:59), faktor-faktor yang mempengaruhi literasi keuangan adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan dan pengetahuan, yaitu tingkat pendidikan dan pengetahuan yang dimiliki seseorang tentang konsep keuangan, termasuk pengelolaan anggaran, investasi, tabungan, pinjaman, dan perlindungan asuransi, memiliki dampak signifikan terhadap tingkat literasi keuangan. Pendidikan formal, pelatihan khusus, dan akses terhadap informasi keuangan yang relevan dapat membantu meningkatkan literasi keuangan individu.
2. Akses ke informasi dan sumber daya keuangan, yaitu akses yang memadai terhadap informasi, sumber daya, dan literatur keuangan merupakan faktor penting dalam meningkatkan literasi keuangan. Kemudahan akses ke buku, artikel, situs *web*, kelas atau seminar keuangan, dan alat bantu teknologi lainnya dapat membantu individu memperoleh pengetahuan dan pemahaman yang diperlukan.
3. Faktor demografi dan konteks sosial, yaitu faktor demografi seperti usia, jenis kelamin, tingkat pendapatan, tingkat literasi umum, dan konteks sosial juga

dapat mempengaruhi literasi keuangan. Konteks sosial, termasuk budaya dan norma sosial, juga dapat mempengaruhi pemahaman dan perilaku keuangan.

4. Kompleksitas produk keuangan, yaitu tingkat kompleksitas produk dan layanan keuangan yang tersedia juga dapat mempengaruhi literasi keuangan. Produk keuangan yang rumit dan sulit dipahami dapat membuat individu merasa kewalahan dan kurang termotivasi untuk meningkatkan literasi keuangannya.
5. Faktor psikologis dan emosional, yaitu seperti kepercayaan diri, toleransi terhadap risiko, dan pengendalian diri dapat berperan penting dalam literasi keuangan. Individu yang memiliki kepercayaan diri dalam mengelola keuangan pribadi, memiliki kemampuan mengendalikan belanja impulsif, dan mampu mengelola risiko keuangan secara efektif cenderung memiliki tingkat literasi keuangan yang lebih tinggi.

Menurut Amri dan Iramani (2018), indikator untuk mengukur literasi keuangan mencakup beberapa aspek dalam keuangan yaitu sebagai berikut:

1. Pengetahuan dasar mengenai keuangan, merupakan suatu proses perencanaan dan pengendalian keuangan dari pribadi individu yang meliputi pemahaman terhadap beberapa hal-hal yang paling dasar dalam sistem keuangan.
2. Manajemen uang, merupakan sikap seseorang dalam mengelola uang serta kemampuan untuk menganalisis sumber pendapatan pribadi yang dimiliki. Manajemen uang juga berkaitan dengan bagaimana seseorang membuat prioritas penggunaan dana serta membuat perencanaan anggaran.
3. Manajemen kredit dan utang, merupakan sikap seseorang terkait pengelolaan likuiditas perseorangan meliputi pengetahuan mengenai kredit dan utang yang terdiri dari faktor-faktor yang mempengaruhi kelayakan kredit, pertimbangan

dalam melakukan pinjaman, karakteristik kredit, tingkat bunga pinjaman, jangka waktu pinjaman, serta sumber dalam mendapatkan kredit dan utang.

4. Tabungan, merupakan proses penyesihan pendapatan sebagai cadangan untuk berjaga-jaga dalam jangka pendek dan bentuknya dapat berupa simpanan di lembaga keuangan seperti bank, yang mana aspek tabungan meliputi pemilihan tabungan yang perlu dipertimbangkan seperti tingkat pengembalian atau persentase kenaikan tabungan, inflasi, pertimbangan-pertimbangan pajak, likuiditas, keamanan atau proteksi terhadap tabungan, serta pembatasan dan pembebanan biaya atas suatu transaksi tertentu.
5. Investasi, merupakan bentuk pengalokasian pendapatan yang dilakukan untuk memperoleh manfaat keuntungan di kemudian hari yang bisa melebihi modal investasi yang dikeluarkan, yang mana aspek investasi ini meliputi penanaman modal pada instrumen-instrumen investasi untuk kegiatan ekonomi dalam menghasilkan pengembalian dana dari modal tersebut yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan.
6. Manajemen risiko, merupakan pengidentifikasian eksposur dari risiko yang dihadapi, mengidentifikasi dampak keuangan dari risiko yang dihadapi, memilih cara yang paling tepat untuk menghadapi risiko tersebut. Bentuk pengendalian risiko yang umum dilakukan adalah dengan asuransi yaitu pengalihan risiko dari satu pihak ke pihak lain.

2.1.6. Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan unit usaha produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi. Pada prinsipnya perbedaan antara usaha mikro,

usaha kecil, usaha menengah, usaha besar umumnya didasarkan pada nilai aset awal yang tidak termasuk tanah dan bangunan, omzet rata-rata per tahun, atau jumlah pekerja tetap (Dewata, 2016:25). Definisi UMKM di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Pada Bab 1 (Ketentuan Umum) pasal 1 dari UU tersebut, dinyatakan bahwa usaha mikro adalah usaha produktif milik orang-perorangan dan badan usaha perorangan yang memenuhi usaha mikro sebagaimana diatur dalam UU tersebut. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang-perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha mikro atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana telah diatur dalam UU tersebut. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha mikro, usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut.

Bentuk perusahaan yang ada dalam UMKM yaitu berupa perusahaan perseorangan, perusahaan firma, perusahaan persekutuan komanditer, perseroan terbatas, koperasi, dan perusahaan milik negara yang terdiri dari perusahaan perseroan (persero) atau perusahaan umum (perum) (Wilantara dan Susilawati, 2016:37). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, maka definisi dari masing-masing usaha adalah sebagai berikut:

1. Usaha mikro adalah usaha dengan kekayaan bersih kurang dari 50 juta rupiah atau menghasilkan penjualan kurang dari 300 juta rupiah selama satu tahun.
2. Usaha kecil adalah usaha dengan kekayaan antara 50 sampai 500 juta rupiah atau menghasilkan penjualan antara 300 juta hingga 2,5 miliar rupiah selama satu tahun.
3. Usaha menengah adalah usaha dengan kekayaan antara 500 juta sampai 10 miliar rupiah atau menghasilkan penjualan antara 2,5 hingga 50 miliar rupiah selama satu tahun.

2.2 Hasil Penelitian Sebelumnya

Beberapa peneliti sebelumnya telah melakukan penelitian mengenai pengaruh modal, inklusi keuangan, dan literasi keuangan terhadap kinerja keuangan pada UMKM. Hasil penelitian sebelumnya diuraikan sebagai berikut.

2.2.1. Pengaruh modal terhadap kinerja keuangan

1. Penelitian Ayem dan Wahidah (2021) membuktikan bahwa modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan serta mengindikasikan adanya akses dan pengelolaan modal yang lebih baik dapat memfasilitasi kegiatan operasional secara keseluruhan karena modal usaha yang memadai dapat memperlancar arus kas dan inovasi serta memperluas pasar, sehingga pada gilirannya mampu meningkatkan kinerja usaha.
2. Penelitian Ferdiansyah dan Bukhari (2021) memperoleh hasil bahwa modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan serta memberikan implikasi yaitu modal yang efektif dapat memastikan ketersediaan dana yang cukup untuk membiayai kegiatan operasional, pengembangan produk, investasi

aset, serta berbagai kebutuhan bisnis lainnya, sehingga modal mampu meningkatkan pertumbuhan dan kinerja pada aspek keuangan usaha.

3. Penelitian Nakibuuka, dkk., (2020) mengimplikasikan bahwa pengelolaan modal usaha yang baik ditunjukkan melalui perencanaan keuangan, pengendalian pada pengeluaran dan biaya, efektivitas manajemen arus kas, serta pemantauan dan analisis keuangan. Optimalisasi penggunaan modal dapat membantu suatu bisnis untuk mencapai tujuan keuangan jangka pendek dan jangka panjang serta meningkatkan kinerja secara keseluruhan.
4. Penelitian Rofiq dan Edward (2019) memperoleh hasil yaitu modal tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan serta mengindikasikan bahwa meskipun modal yang cukup dapat memberikan kestabilan keuangan, namun keseimbangan struktur modal atau efektivitas pengelolaan modal belum tentu mendukung tingkat kinerja keuangan.

2.2.2. Pengaruh inklusi keuangan terhadap kinerja keuangan

1. Penelitian Septiani dan Wuryani (2020) membuktikan bahwa inklusi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan serta mengindikasikan inklusi keuangan dengan akses pada layanan perbankan dapat membantu usaha untuk mengelola arus kas dengan lebih efisien, mencegah kehilangan penyalahgunaan uang tunai, menciptakan kestabilan keuangan, yang pada akhirnya berdampak positif pada kinerja keuangan.
2. Penelitian Febriana dan Sulhan (2021) memperoleh hasil bahwa inklusi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan serta memberikan implikasi yaitu inklusi keuangan dapat membantu usaha untuk

memperluas pasar serta mencapai efisiensi operasional, sehingga mampu meningkatkan profitabilitas sebagai salah satu indikator kinerja keuangan.

3. Penelitian Yanti (2019) mengimplikasikan bahwa akses yang lebih baik ke sumber daya keuangan melalui inklusi keuangan dapat membantu suatu usaha untuk mengumpulkan dana yang diperlukan dalam memulai atau mengembangkan bisnis. Inklusi keuangan yang memadai tersebut memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan kinerja keuangannya.
4. Penelitian Suyanto (2022) memperoleh hasil yaitu inklusi keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Indikasi dari hasil tersebut yakni inklusi keuangan sendiri tidak dapat secara langsung mengatasi masalah ekonomi atau lingkungan bisnis yang lebih luas dan kompleks. Layanan keuangan yang tersedia mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik usaha, sehingga inklusi keuangan tidak berdampak pada kinerja keuangan.

2.2.3. Pengaruh literasi keuangan terhadap kinerja keuangan

1. Penelitian Alamsyah (2020) membuktikan bahwa literasi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan serta mengindikasikan pengusaha dengan literasi keuangan yang memadai cenderung mampu membuat keputusan keuangan yang lebih bijaksana, sehingga hal ini akan mengarahkan usaha pada tingkat kinerja yang lebih tinggi.
2. Penelitian Septiani dan Wuryani (2020) membuktikan bahwa literasi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan serta memberikan implikasi yaitu semakin tinggi tingkat literasi keuangan yang dimiliki pengelola

usaha, maka semakin tinggi pula pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja keuangan usahanya.

3. Penelitian Ye dan Kulathunga (2019) mengimplikasikan bahwa pemilik atau pengelola UMKM dengan literasi keuangan yang baik dapat mengelola sumber daya keuangan dengan lebih bijaksana. Literasi keuangan dibutuhkan dalam manajemen usaha khususnya dalam membuat keputusan berdasarkan informasi keuangan yang akurat, sehingga hal ini juga dapat menentukan kinerja keuangan usaha.
4. Penelitian Puspitasari dan Astrini (2021) memperoleh hasil yaitu literasi keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Indikasi dari hasil tersebut yakni literasi keuangan penting dalam pengelolaan keuangan namun faktor-faktor eksternal lainnya juga berperan dalam menentukan operasional usaha, sehingga literasi keuangan belum tentu mampu meningkatkan kinerja keuangan.

